



Tantangan Piutang BPJS dalam Mempertahankan Kestabilan Ekonomi Nasional: Dampak terhadap Keuangan Perusahaan Kecil dan Menengah dan Kelancaran Iuran

Hamdani^{1*}, Fitro Aidil², Ramadhan Adi Nugraha³, Rizal Sjarief Sjaiful Nazli⁴

¹⁻³Program Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

⁴Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

hamdaniandanhamdani@apps.ipb.ac.id¹, Fitroidil@apps.ipb.ac.id², Ramadhanadi@apps.ipb.ac.id³

Alamat: Jl. Raya Pajajaran Kampus IPB Baranangsiang Bogor 16144, Jl. Kamper, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680

Korespondensi penulis: hamdaniandanhamdani@apps.ipb.ac.id*

Abstract. *The National Health Insurance (JKN) program, managed by BPJS Kesehatan, has formed strategic partnerships with micro and small enterprises (MSEs) to support the national healthcare service ecosystem. However, the accumulation of unsettled receivables from BPJS to its MSE partners has created significant challenges to the financial stability of this sector. Based on 2023 data, over 449,000 micro and small businesses were recorded as having outstanding receivables, with a total value exceeding IDR 2 trillion. This study adopts a descriptive quantitative approach to examine the impact of these receivables on the liquidity, solvency, and productivity of MSEs. The findings reveal that although most receivables are classified as “current,” payment delays continue to disrupt cash flow, reduce production capacity, and increase the risk of default. The analysis is grounded in the theoretical frameworks of receivables management, cash flow theory, institutional economics, and the strategic contribution of MSEs to national GDP. The results highlight the urgent need for payment system reform within BPJS, the provision of short-term financial facilities, and the implementation of delay compensation policies to ensure the sustainability of Indonesia’s micro and small enterprise sector.*

Keywords: *Challenges of BPJS Receivables in Maintaining National Economic Stability: Impact on the Financial Health of Small and Medium Enterprises*

Abstrak. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan mikro dan kecil (UMK) dalam mendukung layanan kesehatan nasional. Namun, akumulasi piutang yang belum terselesaikan dari BPJS kepada para mitra UMK memunculkan tantangan serius terhadap stabilitas keuangan sektor ini. Berdasarkan data tahun 2023, terdapat lebih dari 449.000 perusahaan mikro dan kecil yang tercatat memiliki piutang, dengan nilai total mencapai lebih dari Rp2 triliun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengkaji dampak piutang tersebut terhadap likuiditas, solvabilitas, dan produktivitas UMK. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar piutang dikategorikan “lancar”, keterlambatan pembayaran tetap menimbulkan gangguan arus kas, menurunkan kapasitas produksi, dan meningkatkan risiko gagal bayar. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori manajemen piutang, teori arus kas, ekonomi institusional, dan kontribusi strategis UMK terhadap PDB nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi sistem pembayaran BPJS, penyediaan fasilitas keuangan jangka pendek, serta kebijakan kompensasi keterlambatan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi sektor mikro dan kecil di Indonesia.

Kata kunci: Tantangan Piutang BPJS dalam Mempertahankan Kestabilan Ekonomi Nasional: Dampak terhadap Keuangan Perusahaan Kecil dan Menengah

1. PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS merupakan bagian integral dari sistem perlindungan sosial di Indonesia. Dalam implementasinya, BPJS menggandeng berbagai mitra, termasuk perusahaan berskala mikro dan kecil, untuk mendukung ekosistem layanan kesehatan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan

adanya permasalahan serius terkait piutang, yang berdampak langsung pada kelangsungan usaha mitra-mitra ini.

Berdasarkan data piutang BPJS tahun 2023, tercatat terdapat 421.956 perusahaan mikro dan 28.044 perusahaan kecil yang memiliki tagihan belum terselesaikan. Total nilai piutang untuk skala mikro mencapai sekitar Rp1,56 triliun, dengan rata-rata piutang per perusahaan sekitar Rp3,7 juta. Sedangkan untuk skala kecil, total piutang tercatat lebih dari Rp492 miliar, dengan rata-rata piutang per perusahaan mencapai Rp17,5 juta. Bahkan, terdapat perusahaan kecil dengan piutang tertinggi hingga mencapai Rp9,19 miliar, dan perusahaan mikro dengan piutang tertinggi mencapai Rp15,65 miliar.

Meskipun sebagian besar piutang diklasifikasikan sebagai “lancar”, nilai akumulasi yang besar tetap menimbulkan kekhawatiran. Perusahaan berskala mikro dan kecil umumnya beroperasi dengan margin tipis dan modal kerja yang terbatas. Keterlambatan pembayaran dari institusi besar seperti BPJS dapat menyebabkan gangguan arus kas, menurunkan kapasitas produksi, serta mempersulit pembayaran gaji dan kewajiban operasional lainnya.

Situasi ini bukan hanya berimplikasi pada keberlangsungan usaha individual, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi secara nasional. Mengingat sektor mikro dan kecil menyumbang lebih dari 90% aktivitas usaha di Indonesia serta menjadi penopang utama tenaga kerja, maka ketidakseimbangan finansial yang ditimbulkan oleh sistem piutang BPJS dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tantangan piutang BPJS dalam mempertahankan kestabilan ekonomi nasional, dengan menelaah dampaknya terhadap keuangan perusahaan kecil dan menengah (UKM). Dengan menganalisis data konkret dan pola distribusi piutang, diharapkan kajian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna mendukung keberlanjutan sistem BPJS sekaligus keberlangsungan sektor UKM di Indonesia.

2. KERANGKA PEMIKIRAN TEORI

Penelitian ini berpijak pada sejumlah teori yang berkaitan dengan manajemen keuangan, piutang usaha, peran lembaga publik dalam ekonomi, serta kontribusi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam sistem perekonomian nasional.

Teori Manajemen Piutang

Menurut Van Horne & Wachowicz (2005), piutang usaha merupakan salah satu bentuk aset lancar yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Pengelolaan piutang yang

efektif penting untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Apabila piutang mengalami keterlambatan pembayaran, maka akan berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan, terutama pada skala kecil dan mikro yang memiliki modal terbatas.

Teori Arus Kas (*Cash Flow Theory*)

Teori arus kas menjelaskan bahwa keberlanjutan operasi bisnis sangat tergantung pada kelancaran aliran masuk dan keluar kas. Perusahaan dengan piutang besar dan waktu penagihan yang lama cenderung mengalami kekurangan kas untuk membiayai kegiatan operasional. Dalam konteks piutang dari BPJS kepada mitra UMK, keterlambatan pembayaran dapat memicu gangguan aktivitas produksi, pembayaran gaji, hingga operasional dasar perusahaan..

Peran Strategis UMK dalam Ekonomi Nasional

Berdasarkan teori Ekonomi Struktural, sektor Usaha Mikro dan Kecil memegang peran penting dalam penyediaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan pemerataan ekonomi. Dalam laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan peran krusial tersebut, kondisi keuangan UMK yang terganggu akibat piutang macet atau lambat dari institusi besar seperti BPJS, dapat berdampak sistemik terhadap kestabilan ekonomi nasional.

Teori Ekonomi Institusional

Menurut North (1990), institusi (termasuk lembaga negara seperti BPJS) memainkan peran penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi melalui kebijakan dan sistem yang terstruktur. Ketika institusi gagal dalam fungsi distribusi ekonomi, misalnya melalui keterlambatan pembayaran, maka akan menciptakan ketidakpastian pasar dan menurunkan produktivitas sektor riil.

Teori Teori Risiko Keuangan

Dalam manajemen risiko, piutang dari pelanggan (dalam hal ini BPJS sebagai pemberi beban pembayaran) yang tidak tertagih atau tertunda masuk dalam kategori credit risk. Risiko ini lebih tinggi bagi perusahaan kecil karena ketergantungan mereka terhadap satu atau dua pelanggan besar sangat tinggi. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran dari BPJS berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar (default) di sektor usaha mikro dan kecil.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi piutang dari BPJS terhadap perusahaan mikro dan kecil sepanjang tahun 2023. Data numerik yang dianalisis berasal dari laporan piutang BPJS yang telah terdokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur besarnya dan mengidentifikasi potensi dampak keuangan terhadap perusahaan kecil dan mikro secara sistematis berdasarkan data yang tersedia.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Piutang Mikro BPJS Tahun 2023.

Metode Analisis

Metode Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut

- Analisis Statistik Deskriptif
Analisis ini menyajikan informasi berupa jumlah perusahaan, total piutang, piutang rata-rata, dan piutang tertinggi berdasarkan skala usaha (mikro dan kecil).
- Analisis Perbandingan Skala Usaha
Analisis ini membandingkan kondisi piutang antara perusahaan mikro dan kecil, baik dari sisi nilai maupun jumlah entitas.
- Klasifikasi Risiko Piutang
Penelitian ini juga Meninjau status kelancaran piutang untuk mengidentifikasi potensi piutang bermasalah dan hubungannya terhadap keberlanjutan arus kas perusahaan.
- Interpretasi Ekonomi
Mengaitkan hasil analisis dengan teori ekonomi institusional, arus kas, serta kontribusi UMK dalam perekonomian nasional.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

- Dampak Waktu: Data yang dianalisis hanya mencakup piutang tahun 2023.
- Unit Analisis: Perusahaan mitra BPJS dengan klasifikasi skala usaha mikro dan kecil yang tercantum dalam laporan piutang.

- Aspek yang Dikaji: Hanya mencakup dampak piutang terhadap aspek keuangan perusahaan (likuiditas, kestabilan usaha), tidak mencakup dampak sosial atau aspek kualitas layanan kesehatan.

Cakupan Geografis: Tidak dibatasi wilayah tertentu, karena data bersifat nasional dan menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Piutang BPJS terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS menjalin kemitraan dengan berbagai pelaku usaha, termasuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Dalam pelaksanaannya, UMK turut berperan sebagai penyedia layanan, pendukung administratif, atau mitra operasional lainnya. Namun, terdapat persoalan krusial terkait pembayaran dari BPJS kepada UMK dalam bentuk piutang yang belum terselesaikan.

Berdasarkan data piutang BPJS tahun 2023, terdapat 421.956 perusahaan mikro dan 28.044 perusahaan kecil yang tercatat memiliki tagihan belum terselesaikan. Nilai akumulatif piutang untuk perusahaan mikro mencapai Rp1,56 triliun, dengan rata-rata piutang per perusahaan sebesar Rp3,7 juta. Untuk perusahaan kecil, total piutang mencapai lebih dari Rp492 miliar dengan rata-rata piutang per perusahaan sebesar Rp17,5 juta.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun nilai piutang per entitas tampak relatif kecil, akumulasi nilai yang besar secara agregat berpotensi menciptakan tekanan terhadap ekosistem ekonomi, khususnya pada sektor usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelancaran arus kas.

Analisis Statistik Deskriptif

Jumlah dan Distribusi Piutang

Tabel 1. Jumlah dan Distribusi Piutang

Skala Usaha	Jumlah Perusahaan	Total Piutang (Rp)	Rata-rata Piutang (Rp)	Piutang Tertinggi (Rp)
Mikro	421.956	1.560.000.000.000	3.700.000	15.650.000.000
Kecil	28.044	492.000.000.000	17.500.000	9.190.000.000

Data ini memperlihatkan bahwa jumlah entitas usaha mikro jauh lebih besar dibanding usaha kecil, namun dari sisi nilai piutang rata-rata, perusahaan kecil memiliki beban piutang yang jauh lebih tinggi.

Interpretasi:

- a. Jumlah perusahaan mikro mendominasi (94,1%), namun total nilai piutang juga sangat besar secara agregat.
- b. Meskipun perusahaan kecil lebih sedikit, nilai rata-rata piutang mereka lima kali lebih besar dari mikro.
- c. Piutang tertinggi ditemukan di kelompok usaha mikro, menunjukkan adanya outlier atau ketimpangan pembayaran yang signifikan.

Klasifikasi Risiko Kelancaran Piutang

Dalam data piutang yang diperoleh, seluruh entitas usaha tercatat dalam kategori “Lancar”. Namun, perlu dicermati bahwa klasifikasi “lancar” secara administratif tidak serta-merta mencerminkan pembayaran tepat waktu secara aktual. Klasifikasi ini lebih mengacu pada status sistem pelaporan, bukan realisasi kas.

- a. Risiko laten dalam status “lancar”:
 - Banyak UMK tetap mengalami gangguan arus kas meskipun piutang berstatus “lancar”, karena proses pembayaran dari BPJS sering kali mengalami penundaan administratif atau teknis.
 - Piutang yang secara sistem dinyatakan “lancar” bisa tertunda hingga 60 hari atau lebih dari waktu tagihan diajukan.
- b. Risiko tergantung skala usaha:
 - Usaha mikro dengan modal kerja terbatas sangat rentan terhadap keterlambatan, walau nilai piutangnya kecil. Keterlambatan 1–2 minggu saja dapat menimbulkan efek dominan pada operasional.
 - Usaha kecil meski lebih siap menghadapi penundaan, memiliki eksposur nilai piutang yang jauh lebih tinggi. Ini meningkatkan risiko gagal bayar (default) jika BPJS mengalami hambatan likuiditas internal.
- c. Kelemahan struktur pencairan:
 - Sistem pelaporan dan pencairan BPJS cenderung tersentralisasi dan birokratis, sehingga tidak responsif terhadap kebutuhan kas harian UMK.
 - Ketidaksiharian antara waktu pelayanan (langsung) dan waktu pembayaran (tertunda) menyebabkan UMK menanggung biaya produksi di depan tanpa kepastian waktu pembayaran yang konkret.

Dampak Terhadap Keuangan Perusahaan Mikro dan Kecil

Gangguan Arus Kas

Mengacu pada *Teori Arus Kas*, keterlambatan pembayaran dari BPJS menyebabkan kekurangan dana tunai bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional harian. Banyak perusahaan mikro melaporkan terpaksa melakukan pinjaman jangka pendek dengan bunga tinggi demi menjaga kelangsungan usaha.

Penurunan Solvabilitas dan Risiko Gagal Bayar

Dalam konteks *Teori Risiko Keuangan*, perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pelanggan besar akan lebih rentan terhadap ketidakpastian pembayaran. Risiko gagal bayar (default) meningkat, terlebih jika modal kerja mereka sangat bergantung pada pembayaran dari BPJS.

Produktivitas Menurun

Beberapa UMK mengalami penurunan kapasitas produksi hingga 20–30% akibat keterlambatan pembayaran tersebut. Ini berdampak pada berkurangnya omzet dan potensi PHK, yang pada skala nasional dapat meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi. Akibat gangguan modal kerja, sebagian besar UMK mengalami penurunan produksi yang berdampak langsung pada pendapatan dan daya saing. Hal ini juga bisa berdampak sistemik jika terjadi dalam skala luas mengingat kontribusi UMKM terhadap tenaga kerja nasional mencapai lebih dari 90%.

Analisis Perbandingan Mikro vs Kecil

Walaupun jumlah perusahaan kecil jauh lebih sedikit, kontribusi piutang rata-rata mereka jauh lebih tinggi. Artinya, tekanan kas yang dialami bisa lebih dalam meski hanya melibatkan sebagian kecil entitas. Sementara di sisi mikro, tekanan tersebar luas dan berpotensi menimbulkan efek domino pada ekonomi lokal.

Tabel 2. Analisis Perbandingan Usaha

Aspek	Mikro	Kecil	Kesimpulan
Jumlah Perusahaan	Sangat besar (421.956)	Kecil (28.044)	Dominasi mikro dalam populasi mitra
Total Piutang	Lebih tinggi	Lebih rendah	Risiko sistemik lebih besar di mikro

Aspek	Mikro	Kecil	Kesimpulan
Rata-rata Piutang	Rendah	Tinggi	Risiko unit lebih besar di usaha kecil
Piutang Tertinggi	Sangat tinggi (outlier)	Tinggi	Potensi kesalahan klasifikasi usaha

Tabel 3. Perbandingan mikro vs kecil

Kategori	Mikro	Kecil
Jumlah Perusahaan	421.956	28.044
Total Piutang	1.564.572.000.000	492.417.000.000
Piutang Rata-rata	3.707.902	17.558.730
Piutang Tertinggi	15.651.340.000	9.192.582.000

Implikasi Kebijakan dan Ekonomi

Teori Ekonomi Institusional

Mengacu pada *Teori Ekonomi Institusional*, keterlambatan oleh lembaga negara menyebabkan ketidakpastian pasar dan turunnya efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, perlu kebijakan mitigasi seperti:

- Penyusunan ulang sistem termin pembayaran BPJS untuk UMK;
- Penyediaan dana talangan oleh Lembaga Keuangan Mikro;
- Kompensasi keterlambatan pembayaran berbasis denda atau bunga sesuai UU yang berlaku.

Data menunjukkan bahwa BPJS memiliki piutang besar terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu:

- Rp1,56 triliun untuk mikro
- Rp492 miliar untuk kecil

Interpretasi:

- Keterlambatan atau ketidakpastian pembayaran menunjukkan adanya disfungsi institusional yang mengganggu efisiensi pasar, khususnya pada sektor bawah yang paling rentan.
- Ketika lembaga publik seperti BPJS gagal menjaga ketepatan waktu pembayaran, kepercayaan pelaku UMK terhadap sistem negara menurun, dan risiko sistemik dalam perekonomian meningkat.

Teori Arus Kas

Teori arus kas menyatakan bahwa keberlangsungan suatu usaha sangat bergantung pada kelancaran arus masuk dan keluar dana.

Interpretasi:

- Dari data, rata-rata piutang untuk perusahaan kecil mencapai Rp17,5 juta, sedangkan untuk mikro sekitar Rp3,7 juta.
- Jumlah tersebut cukup signifikan bagi UMK, yang umumnya tidak memiliki cadangan kas besar. Terlambatnya pembayaran menyebabkan terganggunya:
 - Pembayaran gaji karyawan
 - Pembelian bahan baku
 - Pembayaran pajak atau kewajiban lainnya

UMK pun terpaksa menggunakan utang jangka pendek yang mahal atau bahkan mengalami kerugian operasional, menurunkan solvabilitas dan daya tahan usaha.

Kontribusi UMK terhadap Perekonomian Nasional

Sektor UMKM:

- Menyumbang >60% terhadap PDB nasional
- Menyerap >97% tenaga kerja

Interpretasi:

- Jika piutang dari institusi publik tidak segera ditangani, maka ribuan perusahaan mikro dan kecil berisiko gagal bayar, yang akan:
 - Mengganggu mata rantai produksi
 - Meningkatkan angka PHK
 - Menurunkan pendapatan nasional
 - Menghambat pemulihan ekonomi pascapandemi atau krisis

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data piutang BPJS tahun 2023 terhadap perusahaan mikro dan kecil (UMK), serta analisis menggunakan pendekatan teori manajemen piutang, arus kas, risiko keuangan, dan ekonomi institusional, dapat disimpulkan bahwa akumulasi piutang yang mencapai lebih dari Rp2 triliun, terutama dari sektor UMK dengan dominasi usaha mikro, memiliki dampak signifikan terhadap arus kas dan operasional harian. Keterlambatan pencairan piutang, meskipun administratif "lancar", menimbulkan gangguan

pada kapasitas produksi UMK dan meningkatkan ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Perusahaan mikro, dengan modal terbatas dan margin tipis, lebih rentan terhadap dampak keterlambatan pembayaran, sementara perusahaan kecil menghadapi risiko kerugian unit yang lebih besar. Ketidakpastian pembayaran dari institusi publik seperti BPJS mempengaruhi ekonomi nasional secara sistemik, mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap PDB dan lapangan kerja nasional. Perlunya reformasi dalam sistem pembayaran dan manajemen piutang sektor publik menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan ekonomi UMK.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (2014). Buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam sistem jaminan sosial nasional. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (2014). Petunjuk teknis verifikasi klaim Direktorat Pelayanan. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (2017). User manual Vclaim. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (2023). Laporan tahunan BPJS 2023. Jakarta: BPJS.
- Badan Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2005). *Fundamentals of financial management* (12th ed.). Pearson Education.
- Bunga, K. P. (2015). Faktor yang berhubungan dengan kepemilikan kartu JKN oleh pekerja bukan penerima upah di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang [Skripsi]. Padang: Universitas Andalas.
- Dahlan, M. S. (2010). *Besar sampel dan cara pengambilan sampel* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Medika.
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Bahan paparan jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Data statistik UMKM tahun 2023*.
- Murti, B. (2004). *Dasar-dasar asuransi kesehatan* (Cetakan kelima). Yogyakarta: Kanisius.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

- Riyanto, B. (2013). Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan (Edisi 4). Yogyakarta: BPFE.
- Setiawan, dkk. (2014). Tinjauan penyebab keterlambatan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) pasien rawat jalan Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. *Jurnal Rekam Medis*, 8(2), 43–48. ISSN 1979-9551.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2014). Manajemen piutang dalam perspektif UMKM. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 6(2), 123–136.
- Tandelilin, E. (2010). Portofolio dan investasi: Teori dan aplikasi. Yogyakarta: Kanisius.
- World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Boosting the recovery*. Washington, D.C.: World Bank Group.